

## KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI PESERTA TENDER TERHADAP ANJURAN INDUK PERUSAHAAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERUSAHAAN GRUP BUMN

(Studi Kasus PT GMF AeroAsia)

Wilmawardani<sup>1</sup>, Kariodimedjo<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kemandirian PT GMFAA sebagai anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia dalam hal mengikuti tender. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bentuk dominasi yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia, serta mengetahui bentuk pengendalian ideal yang dilakukan antara induk usaha dan anak usaha dalam perusahaan grup.

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris (*applied law research*), yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari Kementerian BUMN, PT GMFAA, dan PT Garuda Indonesia. Kemudian data hasil wawancara tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan: pertama, dalam hal keikutsertaan suatu tender pada tahun 2019 lalu, derajat pengendalian yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia selaku induk perusahaan dari PT GMFAA merupakan bentuk dominasi, karena harus tunduknya anak perusahaan atas instruksi yang diberikan oleh induk perusahaan. Kedua, dalam kasus ini, PT GMFAA tidak memiliki kendali dalam menolak arahan untuk tidak mengikuti tender ini, karena adanya tekanan dari pihak induk perusahaan. Ketiga, pengendalian ideal yang dapat dilakukan oleh PT Garuda Indonesia jika merujuk kepada peraturan perundang-undangan dalam UUPT, PerMen BUMN PER-01/MBU/2011, serta AD ART Perseroan, telah dituliskan terkait tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki batasan ketentuan dalam ranahnya sebagai pemangku jabatan di induk perusahaan terhadap kegiatan anak perusahaan. Jika induk perusahaan ingin melakukan intervensi lebih jauh dalam hal strategis perusahaan, induk perusahaan harus meminta persetujuan pemegang saham lain melalui RUPS.

**Kata Kunci:** kemandirian anak perusahaan, BUMN, perusahaan grup.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**INDEPENDENCE OF SUBSIDIARIES AS TENDER PARTICIPANTS  
ON THE RECOMMENDATION OF THE PARENT COMPANY VIEWED  
FROM LEGAL ASPECTS OF BUMN GROUP COMPANIES  
(CASE STUDY PT GMF AEROASIA)  
(Studi Kasus PT GMF AeroAsia)  
Wilmawardani<sup>3</sup>, Kariodimedjo<sup>4</sup>**

**ABSTRACT**

This study aims to determine and analyze the independence of PT GMFAA as a subsidiary of PT Garuda Indonesia in terms of participating in tenders. In addition, this study also intended to analyze the form of domination carried out by PT Garuda Indonesia, as well as to determine the ideal form of control carried out between the parent company and subsidiaries within the group company.

In this study, normative empirical juridical (applied law research) was used, which was supported by interviews with sources from the Ministry of State-Owned Enterprises, PT GMFAA, and PT Garuda Indonesia. Then the data from the interviews were analyzed qualitatively with descriptive analytical method.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded: First, in terms of participating in a tender in 2019, the degree of control by PT Garuda Indonesia as the parent company of PT GMFAA is a form of domination, because the subsidiary must obey to the instructions given by the parent company. Second, in this case, PT GMFAA has no control in rejecting the directive to not participate in the tender, due to pressure from the parent company. Third, the ideal control that can be carried out by PT Garuda Indonesia refers to the laws and regulations in the Regulation of Republic Indonesia Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company, Minister of BUMN PER-01/MBU/2011, as well as the Company's Articles of Association, have been written regarding the duties, responsibilities, and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have limited provisions in their position as a Board in the parent company for the activities of the subsidiary. If the parent company wishes to intervene further in the company's strategic matters, the parent company must seek approval from other shareholders through the General Meeting of Shareholders.

**Keywords: independence of subsidiary, State Owned Enterprises, group company**

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta Universitas Gadjah Mada.

<sup>4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.